

Studi Perubahan Konfigurasi Ruang Kabupaten Sumedang sebagai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede

Study of Configuration Change in Sumedang Regency Spatial as Impact of Jatigede Dam Development

¹M Reza Hardiansyah, ²Nia Kurniasari

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹rezaardiansy@gmail.com, ²niawitaresna@gmail.com

Abstract. Acceleration of development in Indonesia is a high priority to be stimulate the development of the area. One of development being initiated by the Government is the development Jatigede Dam on five districts in Sumedang which serves as a source of water rice fields and other sources of hydropower plants as well as to meet the need of raw water resident in Sumedang, Majalengka Regency Indramayu Regency, Cirebon Regency and Cirebon City. In addition to providing the benefits, this development has an impact on the spatial patterns and structures in the area of Sumedang. The impact on the spatial pattern occurs because of changes in land use patterns. While the impact on the spatial structure is a change in growth centers in the region of Sumedang. Changes in the structure of this space because the land settlements, agricultural land, infrastructure and road network in the affected area changed into Jatigede Dam. These changes have a tendency to change the spatial configuration of Sumedang Regency. Hence it is necessary for Space Studies Configuration Changes As the Sumedang District Development Impact Jatigede in the analysis based on the analysis of demographic, economic agglomeration analysis, gravitation analysis, schallogram analysis and continued with progplan analysis and overlay analysis. Based on some of the analysis, configuration changes are seen Sumedang Regency space. These changes occurred in districts hierarchy in Sumedang district which produces a new space configuration in Sumedang. The results of this analysis can be input for Sumedang regency government to be able to provide treatment for every district in Sumedang.

Keywords: Spatial Configuration, Spatial Structure, Growth Pole Center

Abstrak. Percepatan pembangunan di Indonesia menjadi prioritas utama untuk dapat merangsang perkembangan daerah. Salah satu pembangunan yang sedang digagas oleh pemerintah adalah pembangunan Waduk Jatigede pada lima kecamatan di Kabupaten Sumedang yang berfungsi sebagai sumber air lahan persawahan dan sumber pembangkit listrik tenaga air serta untuk mencukupi kebutuhan air baku penduduk di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Selain memberikan manfaat, pembangunan ini memberikan dampak terhadap pola ruang dan struktur ruang pada Kabupaten Sumedang. Dampak terhadap pola ruang terjadi karena adanya perubahan pola penggunaan lahan. Sedangkan dampak terhadap struktur ruang adalah adanya perubahan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sumedang. Perubahan struktur ruang ini dikarenakan lahan permukiman penduduk, lahan pertanian, sarana dan prasarana serta jaringan jalan di wilayah terdampak berubah fungsi menjadi Waduk Jatigede. Perubahan ini memiliki kecenderungan merubah konfigurasi ruang dari Kabupaten Sumedang. Oleh Karena itu perlu dilakukan Studi Perubahan Konfigurasi Ruang Kabupaten Sumedang Sebagai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede yang di analisis berdasarkan analisis kependudukan, analisis aglomerasi ekonomi, analisis gravitasi, analisis skalogram dan dilanjutkan dengan analisis progplan serta analisis overlay. Berdasarkan beberapa analisis tersebut, Kabupaten Sumedang mengalami perubahan konfigurasi ruang. Perubahan ini terjadi pada hirarki kecamatan dalam Kabupaten Sumedang yang menghasilkan konfigurasi ruang baru di Kabupaten Sumedang. Hasil analisis ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Sumedang untuk dapat memberikan penanganan bagi setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Konfigurasi Ruang, Struktur Tata Ruang, Pusat Pertumbuhan Wilayah

A. Pendahuluan

Percepatan pembangunan di Indonesia menjadi prioritas utama untuk dapat merangsang perkembangan daerah. Salah satu pembangunan yang sedang digagas oleh pemerintah adalah pembangunan Waduk Jatigede pada lima kecamatan di Kabupaten

Sumedang yang berfungsi sebagai sumber air lahan persawahan dan sumber pembangkit listrik tenaga air serta untuk mencukupi kebutuhan air baku penduduk di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.

Selain memberikan manfaat, pembangunan ini memberikan dampak terhadap pola ruang dan struktur ruang pada Kabupaten Sumedang. Dampak terhadap pola ruang terjadi karena adanya perubahan pola penggunaan lahan. Sedangkan dampak terhadap struktur ruang adalah adanya perubahan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sumedang. Perubahan struktur ruang ini dikarenakan lahan permukiman penduduk, lahan pertanian, sarana dan prasarana serta jaringan jalan di wilayah terdampak berubah fungsi menjadi Waduk Jatigede.

Akibat dari pembangunan Waduk Jatigede terjadi pergerakan penduduk ke dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang dan keluar dari Kabupaten Sumedang. Pergerakan penduduk ke dalam beberapa kecamatan ini menjadi penyebab adanya perubahan struktur penduduk kecamatan di Kabupaten Sumedang. Kemudian penduduk tersebut membutuhkan lahan untuk dijadikan tempat tinggal setelah adanya pembangunan Waduk Jatigede.

Selanjutnya adalah adanya perubahan mata pencaharian penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede. Perubahan ini terjadi karena lahan pertanian yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk berubah fungsi menjadi Waduk Jatigede. Mayoritas perubahan mata pencaharian penduduk adalah dari bekerja pada sektor primer menjadi bekerja pada sektor tersier. Kemudian berkurangnya fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan pendapatan Kabupaten Sumedang pada sektor primer berkurang.

Dampak lain yang ditimbulkan dari pembangunan Waduk Jatigede adalah perubahan aksesibilitas tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sumedang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa jaringan jalan lokal ikut terendam kedalam area Waduk Jatigede. Sehingga aksesibilitas pada beberapa kecamatan terdampak mengalami penurunan tingkat aksesibilitasnya. Kemudian untuk daerah tujuan pergerakan penduduk mengalami peningkatan kebutuhan terhadap aksesibilitas karena adanya pembukaan lahan untuk kawasan permukiman.

Selain itu, pembangunan Waduk Jatigede juga memberikan dampak terhadap jumlah ketersediaan sarana penunjang kehidupan sehari-hari penduduk. Pada kecamatan yang terkena dampak langsung pembangunan Waduk Jatigede terjadi penurunan jumlah sarana penunjang kehidupan sehari-hari penduduk seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa. Sedangkan pada wilayah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk, kebutuhan sarana penunjang kehidupan sehari-hari penduduk meningkat sesuai dengan banyaknya penduduk yang berpindah ke dalam kecamatan yang menjadi tujuan pergerakan penduduk.

Perubahan struktur penduduk, perubahan mata pencaharian dan pendapatan Kabupaten Sumedang, perubahan aksesibilitas dan perubahan ketersediaan sarana penunjang kehidupan penduduk ini memiliki kecenderungan merubah konfigurasi ruang dari Kabupaten Sumedang. Oleh Karena itu perlu dilakukan Studi Perubahan Konfigurasi Ruang Kabupaten Sumedang Sebagai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede

Berdasarkan latar belakang di atas, pembangunan Waduk Jatigede memberikan dampak bagi wilayah di sekitarnya dan Kabupaten Sumedang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi adalah Bagimanakah Konfigurasi Ruang yang terbentuk di

Kabupaten Sumedang setelah pembangunan Waduk Jatigede.

B. Landasan Teori

Perencanaan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *non-controllable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dikemukakan Robinson Tarigan (2005). Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan kelestarian lingkungan paling maksimal setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak.

Teori Pendekatan Pengembangan Wilayah

Teori ini diambil dari strategi pengembangan wilayah dalam perspektif *Development from Below* yang dikemukakan oleh Myrdall (1957), Hirschman (1958) dan Friedmann (1966). Proses internalisasi potensi lokal wilayah merupakan awal bagaimana suatu wilayah dapat berkembang. Menurut perspektif ini, terdapat strategi pendekatan-pendekatan pengembangan wilayah, yaitu pendekatan pengembangan teritorial, fungsional dan pendekatan agropolitan. Secara umum pendekatan-pendekatan tersebut memfokuskan pada upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap wilayah pusat.

Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan dari pendekatan pengembangan wilayah tersebut. Perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek, diantaranya:

- Hubungan (*linkage*) dengan wilayah lain
- Kemungkinan wilayah penerapan
- Perhatian atas aspek penunjang
- Sistem manajemen
- Tuntutan adanya *leading core*

Teori Perkembangan Wilayah

John Friedman, Weaver (1979) menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih umum. Friedmann menampilkan teori daerah inti yang berjudul "*A General Theory of Polarized Development*", dalam N.M. Hasen (ed), 1972, h. 83-101. Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau *periphery regions*. Daerah-daerah pinggiran seringkali disebut pula daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah di sekitarnya. Friedman membagi suatu wilayah menurut karakter perkembangannya yaitu:

- Wilayah Inti (*Core Regions*)
- Kawasan Transisi Menaik (*Upward-Transitional Areas*)
- Wilayah Perbatasan (*Resource Frontier Regions*)
- Kawasan Transisi Menurun (*Downward-Transitional Areas*)
- Wilayah Permasalahan Khusus (*Special Problem Regions*)

Teori Pusat Pertumbuhan

Ide awal tentang pusat pertumbuhan (growth poles) mula-mula dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Perancis, pada tahun 1955. Dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu:

- Pusat Pertumbuhan Primer (Utama)
- Pusat Pertumbuhan Sekunder (Kedua)
- Pusat Pertumbuhan Tersier (Ketiga)

Untuk dapat melihat pusat pertumbuhan dan menentukan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan perkembangan pada suatu wilayah ditentukan oleh faktor-faktor pembentuknya. Adapun faktor pembentuk pusat pertumbuhan pada suatu wilayah sebagai berikut:

- Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu modal bagi setiap daerah yang berpotensi dan berperan dalam pembentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Sumber daya ini terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia berperan sebagai subjek yang akan menjalankan fungsi dari pusat pertumbuhan wilayah. Kemudian sumber daya alam merupakan modal awal untuk dapat membentuk suatu pusat pertumbuhan.

- Kondisi Fisiografi / Kondisi

Kondisi fisiografi / lokasi sangat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan pusat pertumbuhan. Lokasi yang strategis memudahkan untuk kegiatan transportasi baik barang maupun orang.

- Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang akan mendukung pembentukan dan perkembangan pusat pertumbuhan pada suatu wilayah. Ketersediaan fasilitas penunjang dapat mendukung kegiatan yang ada di dalam pusat pertumbuhan baik kegiatan sehari-hari penduduk maupun kegiatan social ekonomi penduduk.

Kebijakan Terkait Struktur Ruang

- Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kabupaten Sumedang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dalam Pasal 1 PP No. 26/2008 pengertian dari PKL adalah Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

- Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Sumedang masuk kedalam Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung yang mengandalkan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Cekungan Bandung meliputi pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung. Fokus pengembangan Kabupaten Sumedang diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung minimal, serta pusat pendidikan tinggi di Kawasan Jatinagor, agrobisnis dan industri.

- Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang memiliki lima pusat pelayan kegiatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan fungsi berbeda-beda dan satu kawasan yang memiliki sebagai kawasan perkotaan. Kemudian Kabupaten Sumedang memiliki sembilan belas pusat pelayanan lingkungan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan dari lima pusat pelayanan kegiatan dan satu kawasan perkotaan.

Kriteria Rencana Struktur Ruang

- Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:
- kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan
- jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi ketentuan.

Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
- memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
- harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.

C. Metode Penelitian

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam Studi Perubahan Konfigurasi Ruang Kabupaten Sumedang Sebagai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede didasarkan pada adanya kebijakan mengenai pembangunan Waduk Jatigede. Untuk dapat melihat perubahan struktur ruang setelah adanya Waduk Jatigede, maka harus diidentifikasi kondisi pembentuk struktur ruang seperti aglomerasi penduduk, pertumbuhan ekonomi daerah, kelengkapan sarana dan prasarana serta aksesibilitas di daerah tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi kondisi pembentuk struktur ruang perlu diadakan pengumpulan data terkait. Pengumpulan data terkait ini dapat berupa data primer dan data sekunder.. data primer dapat dilakukan dengan cara observasi lapangan, ground check dan kuisioner. Sedangkan data primer dapat dilakukan dengan cara studi literatur, studi kepustakaan dan Browsing Internet. Kemudian data-data yang sudah didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis penduduk, analisis ekonomi, analisis skalogram dan analisis aksesibilitas. Setelah dianalisis dengan menggunakan metode tersebut maka dirumuskan pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan. Setelah itu dibuat konsep pengembangan sistem konfigurasi ruang agar konfigurasi ruang dapat berjalan

dengan baik. Langkah terakhir adalah penentuan pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan kuantitatif dipilih untuk “Studi Perubahan Konfigurasi Ruang Kabupaten Sumedang Sebagai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede” karena studi ini terdiri atas perhitungan-perhitungan berdasarkan teori pembentukan pusat pertumbuhan.

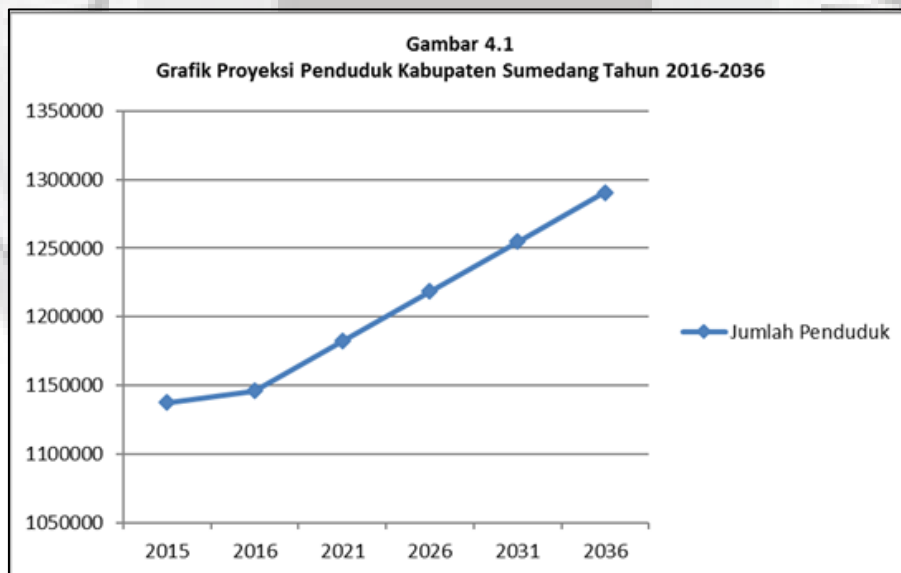
Metoda Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan Studi Perubahan Konfigurasi Ruang Kabupaten Sumedang Sebagai Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dilakukan dengan dua metode survey yaitu metode survei primer dan metode survey sekunder. Kedua metode tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara mengamati dan meneliti objek yang disurvei. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi–instansi dan studi literatur.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Proyeksi Penduduk

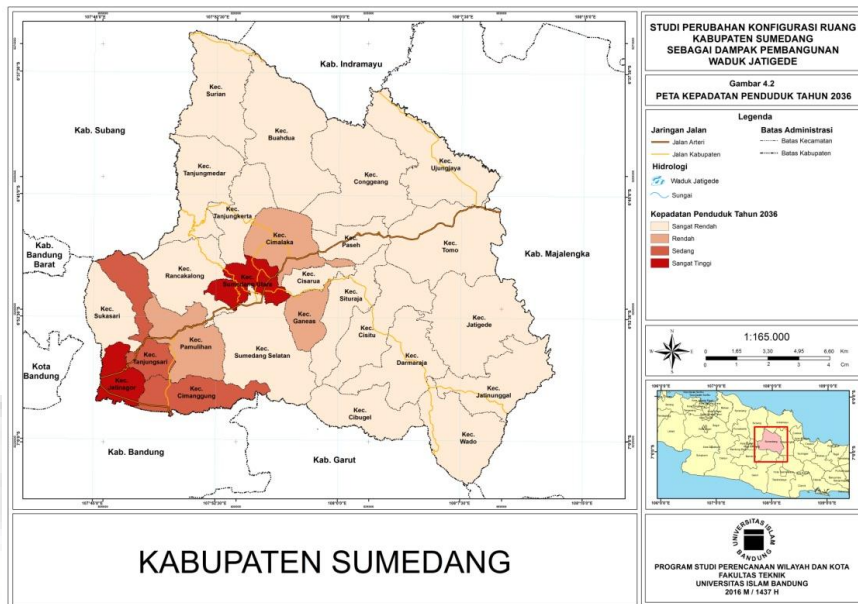
Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk dengan menggunakan metode regresi linear, kondisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2036 mengalami peningkatan sebesar 153.439 Jiwa dari jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 1.137.273 Jiwa. Peningkatan ini berlangsung secara terus menerus setiap tahunnya dan membentuk sebuah garis linear.



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Jika lahan yang tersedia untuk penduduk di Kabupaten Sumedang tetap maka kepadatan penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang akan meningkat. Peningkatan ini ditambah dengan aktivitas Waduk Jatigede di masa yang akan datang yang akan difungsikan sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Sumedang. Kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Jatinagor dengan kepadatan penduduk sebesar 4.307 Jiwa/Km². Dengan demikian, di kecamatan Jatinagor untuk satu kilometer persegi menampung 4.307 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk

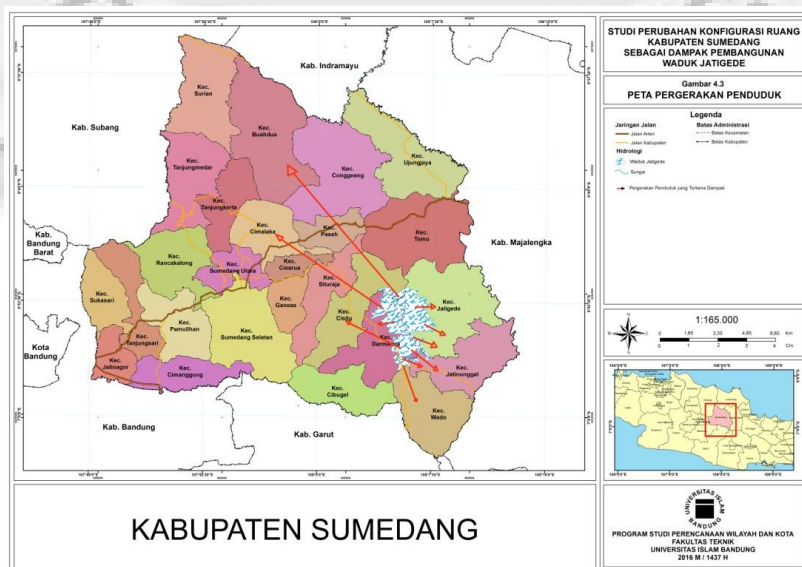
terendah terjadi di Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Surian dengan kepadatan penduduk sebesar 220 Jiwa//Km².



Gambar 2. Peta Kabupaten Sumedang

Analisis Pergerakan Penduduk

Penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede ini berpindah tempat tinggal ke daerah sekitar Waduk Jatigede dan beberapa tempat di Kabupaten Sumedang. Selain itu beberapa penduduk memutuskan untuk berpindah tempat tinggal keluar Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pemabngunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumedang arah minat penduduk yang terkena dampak pembangunan adalah ke daerah sekitar Waduk Jatigede yang posisinya lebih tinggi dari genangan air Waduk Jatigede.



Gambar 3. Peta Kabupaten Sumedang

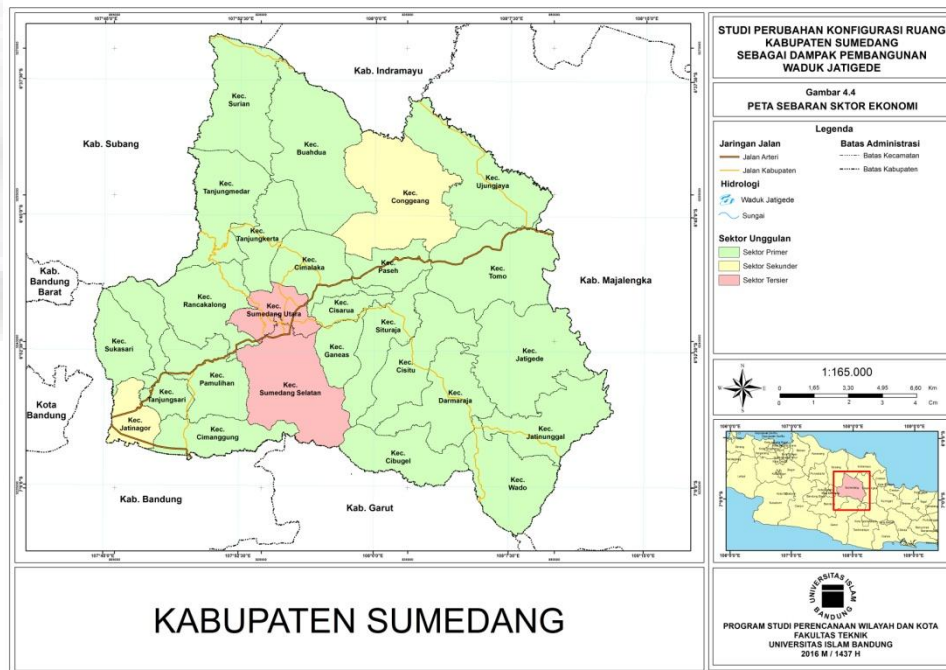
Analisis Ekonomi

Analisis sektor unggulan ini dilakukan untuk mengetahui keunggulan sektor yang dimiliki oleh kecamatan berdasarkan kontribusinya terhadap sektor ekonomi kabupaten. Penentuan sektor unggulan ini dilihat dengan menggabungkan dua metode analisis yaitu analisis Location Quotient dan analisis Shift-Share untuk mendapatkan hasil yang tepat.

Tabel 1. Karakteristik Sektor Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Kelompok Sektor											
		Primer	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Sekunder	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air Bersih	Bangunan	Tersier	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan dan JP	Jasa - Jasa
1	Jatinagor	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan
2	Cimanggung	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
3	Tanjungsari	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan
4	Rancakalong	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan
5	Sumedang Selatan	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Unggulan
6	Sumedang Utara	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial
7	Situraja	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan
8	Darmaraja	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan
9	Cibugel	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
10	Wado	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Potensial
11	Jatigede	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan
12	Tomo	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
13	Ujungjaya	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
14	Conggeang	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
15	Paseh	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Potensial
16	Cimalaka	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Unggulan
17	Tanjungkerta	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan
18	Buahdua	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
19	Sukasari	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan
20	Pamulihan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
21	Ganeas	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan
22	Cisitu	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan
23	Jatinunggal	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan
24	Cisarua	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Unggulan
25	Tanjungmedar	Unggulan	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan
26	Surian	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Potensial	Unggulan	Unggulan	Potensial	Potensial	Unggulan	Potensial	Unggulan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

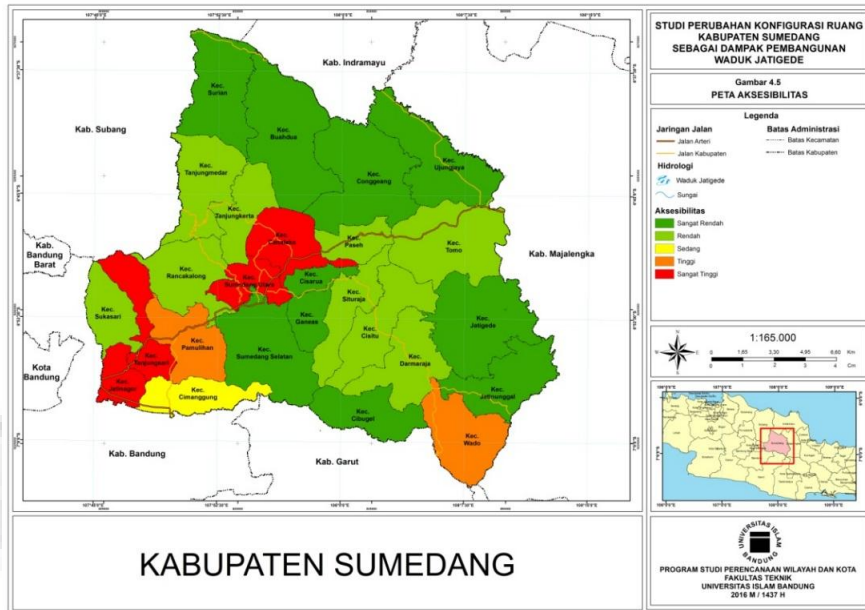


Gambar 4. Peta Kabupaten Sumedang

Analisis Aksesibilitas

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Suedang adalah analisis gravitasi. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai-nilai aksesibilitas tiap-tiap kecamatan. Kecamatan Tanjungsari yang

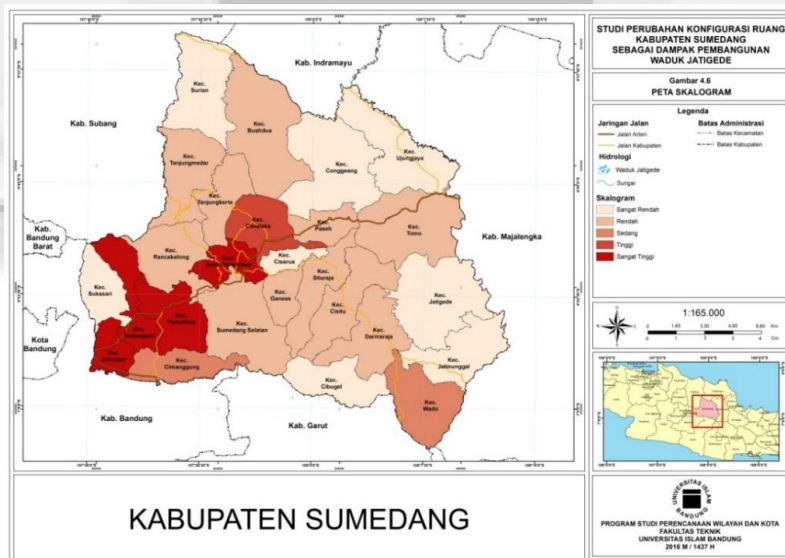
mempunyai nilai aksesibilitas tertinggi sebesar 19.775.316.499 sedangkan Kecamatan Surian mempunyai nilai aksesibilitas terendah sebesar 57.082.623.



Gambar 5. Peta Kabupaten Sumedang

Analisis Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui bobot yang akan dilanjutkan pada analisis Proglan. Variabel yang digunakan dalam analisis ini berjumlah lima belas yang terdiri dari beberapa penjabaran aspek demografi, aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kecamatan Sumedang Utara memiliki total bobot terbesar yaitu 59 dan Kecamatan Cisarua memiliki bobot terendah yaitu 16.



Gambar 6. Peta Kabupaten Sumedang

Analisis Proglan

Analisis proglan merupakan lanjutan dari analisis aksesibilitas dan analisis

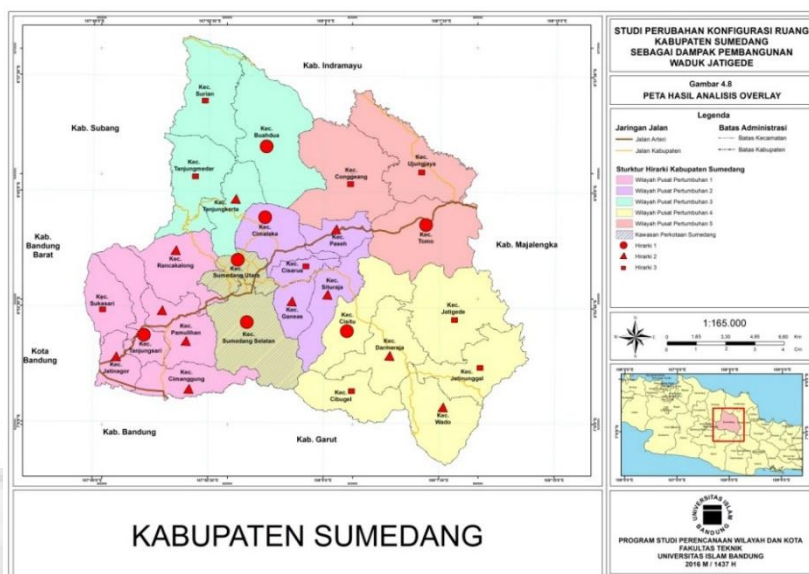
skalogram. Analisis ini dilakukan untuk menentukan lokasi pusat pelayanan dengan menggunakan software progplan. Sebelum menentukan hipotesa awal, perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan kepada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang. Hal ini akan mempertegas hasil dari hipotesis akhir yang akan dihasilkan dari analisis progplan. Kemudian data-data tersebut dimasukkan kedalam program progplan untuk dianalisis lebih lanjut mengenai keterpusatan beberapa variabel yang digunakan dalam analisis skalogram. Hasil akhir dari analisis progplan menyebutkan bahwa pusat pertumbuhan terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cisitu dan Kecamatan Tomo.



Gambar 7. Peta Kabupaten Sumedang

Analisis Overlay

Analisis ini merupakan penyempurnaan dari beberapa analisis yang telah dilakukan dengan cara memberikan bobot terhadap setiap kecamatan berdasarkan hasil dari setiap analisis. Tujuan dari analisis adalah untuk menentukan struktur hirarki dari Kabupaten Sumedang.



Gambar 8. Peta Kabupaten Sumedang

1. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis penduduk, analisis ekonomi, analisis aksesibilitas, analisis skalogram dan analisis progplan serta hasil overlay semua analisis, maka didapatkan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Sumedang. Pusat pertumbuhan yang didapatkan membentuk konfigurasi ruang baru setelah pembangunan Waduk Jatigede.

Tabel 2. Perbandingan Konfigurasi Ruang Sebelum dan Sesudah Pembangunan Waduk Jatigede

	Kecamatan	Konfigurasi Ruang Lama	Konfigurasi Ruang Baru	Arahan	Keterangan
1	Sumedang Utara	Kawasan Perkotaan Sumedang / Hirarki 1	Kawasan Perkotaan Sumedang / Hirarki 1	Pusat Pemerintahan Kabupaten, Perdagangan dan Jasa Skala Regional, Pusat Pendidikan Menengah	Perlu adanya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung fungsi pusat pemerintahan
2	Sumedang Selatan	Kawasan Perkotaan Sumedang / Hirarki 1	Kawasan Perkotaan Sumedang / Hirarki 1	Pusat Pemerintahan Kabupaten, Perdagangan dan Jasa Skala Regional, Pusat Pendidikan Menengah	Perlu adanya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung fungsi pusat pemerintahan
3	Tanjungsari	PPK / Hirarki 1	PPK / Hirarki 1	Pusat Pemerintahan Kecamatan, Perdagangan dan Jasa, Pusat Pendidikan Tinggi	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung fungsi pusat pelayanan keiatan
4	Jatinagor	PPL / Hirarki 2	PPL / Hirarki 2	Industri, Perdagangan dan Jasa, Pusat Pendidikan Tinggi	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
5	Cimanggung	PPL / Hirarki	PPL / Hirarki	Industri,	Perlu adanya perbaikan

	Kecamatan	Konfigurasi Ruang Lama	Konfigurasi Ruang Baru	Arahan	Keterangan
		2	2	Perdagangan dan Jasa	sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
6	Pamulihan	PPL / Hirarki 2	PPL / Hirarki 2	Pertanian, Perdagangan dan Jasa	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
7	Rancakalong	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 2	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
8	Sukasari	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 3	Pertanian, Perdagangan dan Jasa	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
9	Cimalaka	PPL / Hirarki 2	PPK / Hirarki 1	Pertanian, Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Regional	Perlu adanya perbaikan, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
10	Situraja	PPL / Hirarki 2	PPL / Hirarki 2	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
11	Paseh	PPL / Hirarki 2	PPL / Hirarki 2	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
12	Ganeas	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 2	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
13	Cisarua	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan

	Kecamatan	Konfigurasi Ruang Lama	Konfigurasi Ruang Baru	Arahan	Keterangan
14	Buahdua	PPL / Hirarki 2	PPK / Hirarki 1	Pertanian, Peternakan dan Perdagangan Lokal	Perlu adanya perbaikan, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
15	Tanjungkerta	PPK / Hirarki 1	PPL / Hirarki 2	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya penyesuaian sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
16	Tanjungmedar	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
17	Surian	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
18	Cisitu	PPL / Hirarki 2	PPK / Hirarki 1	Pertanian, Peternakan, Perdagangan Lokal dan Pariwisata	Perlu adanya perbaikan, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
19	Darmaraja	PPL / Hirarki 2	PPL / Hirarki 2	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
20	Wado	PPK / Hirarki 1	PPL / Hirarki 2	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya penyesuaian sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan
21	Jatinunggal	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuuk dapat mendukung pusat pelayan kegiatan


	Kecamatan	Konfigurasi Ruang Lama	Konfigurasi Ruang Baru	Arahan	Keterangan
22	Jatigede	PPL / Hirarki 2	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya penyesuaian sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung pusat pelayanan kegiatan
23	Cibugel	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung pusat pelayanan kegiatan
24	Tomo	PPK / Hirarki 1	PPK / Hirarki 1	Pertanian, Pusat Perdagangan Lokal dan Pariwisata	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung pusat pelayanan kegiatan
25	Ujungjaya	PPL / Hirarki 3	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung pusat pelayanan kegiatan
26	Conggeang	PPK / Hirarki 1	PPL / Hirarki 3	Pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan	Perlu adanya penyesuaian sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk dapat mendukung pusat pelayanan kegiatan


Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan :

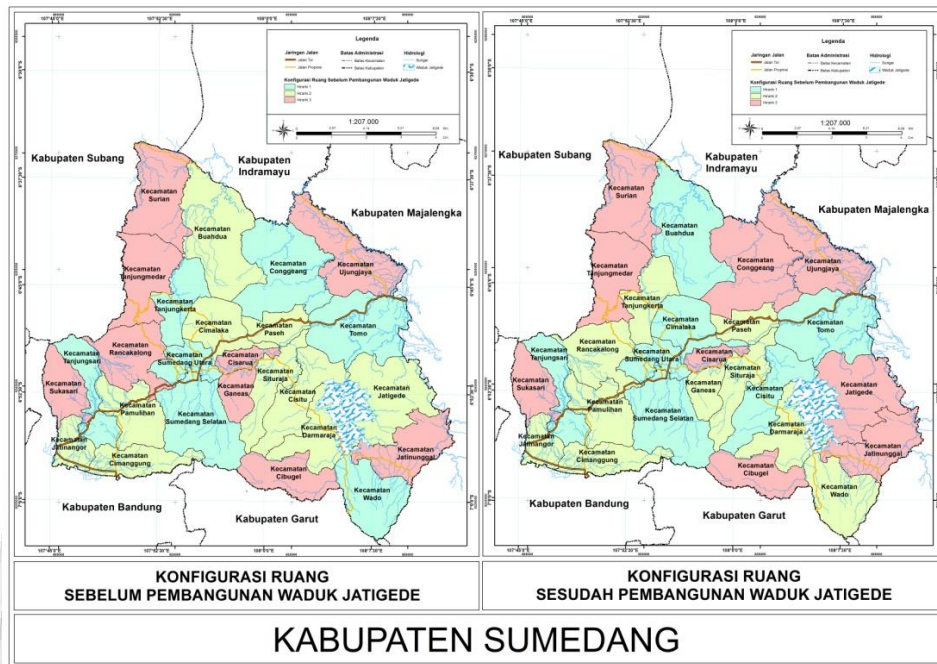
PPK : Pusat Pelayanan Kegiatan

PPL : Pusat Pelayanan Lingkungan

 : Mengalami Kenaikan Fungsi

 : Mengalami Penurunan Fungsi

 : Fungsi tetap



Gambar 9. Peta Kabupaten Sumedang

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di Kabupaten Sumedang, terdapat 5 wilayah pengembangan yaitu Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cisu, Kecamatan Tomo. Berdasarkan hasil analisis ini terdapat pergeseran pusat pertumbuhan yang diakibatkan adanya perubahan faktor-faktor pembentuk konfigurasi ruang seperti persebaran penduduk, kondisi ekonomi, sentralitas fasilitas dan aksesibilitas. Pada pusat pertumbuhan yang mengalami perubahan, perlu dipersiapkan lebih lanjut untuk dapat melayani daerah-daerah disekitarnya.

Saran

Pemerintah Daerah perlu mengkaji ulang mengenai pusat-pusat pertumbuhan, struktur hierarki dan sistem jaringan pendukung lainnya untuk dapat mengembangkan Kabupaten Sumedang. Hasil studi ini dapat dijadikan pertimbangan dan dasar penentuan konfigurasi ruang baru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk perbaikan konfigurasi ruang setelah pembangunan Waduk Jatigede.

Daftar Pustaka

Assoen, M Harriadi. 1995. *Pengembangan Wilayah Fakultas Teknik Planologi*. Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung

Badan Pusat Statistik. 2016. *Buku Statistik Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015*. Sumedang: Badan Pusat Statistik

Danastri, Sasya. 2008. *Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kecamatan Harjamukti Cirebon Selatan*.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro

- Friedman, John. 1966. *A General Theory of Polarized Development*. Vienna
- Glasson, John. 1974. *An Introduction To Regional Planning*. London
- Gulo, Yarman. 2015. *Identifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias*
- Hirschman, Albert O. 1958. *The Strategy of Economic Development*. Berlin
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. Stockholm
- Nainggolan, Pandapotan T.P. 2011. *Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simanggalun*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pembebasan Tanah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 20 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.
- Perroux, Francois. 1955. *A New Concept Of Development*. Paris
- Richardson, Harry W. 1978. *Urban and Regional Economic*. Chicago: University of Illinois Press.
- Risman Agung Santika. 2009. *Arahan Penentuan Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi Utara Sebagai Kabupaten Baru*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Islam Bandung
- Santoso, Eko Budi. 2014. *Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupate Gunung Kidul*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan*. Institut Teknologi Seuluh November Vol. 3, No 2.
- Shellby Devianty Widodo. 2014. *Model Struktur Ruang Growth Pole (Studi Kasus Tembalang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yunus, Hadi Sabari. 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar